

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Mepeling pembuatan akta kelahiran di Kota Bandung sudah berhasil. Maka dalam bab kesimpulan ini akan disajikan hasil berdasarkan dari ke empat indikator yang telah di bahas di bab teori, yaitu sebagai berikut:

1. Kecepatan. Indikator ini menunjukkan hasil bahwa masyarakat tidak perlu datang dan mengantri lagi di Kantor Disdukcapil Kota Bandung. Serta pelayanan yang diberikan tidak berbelit-belit karena masyarakat cukup mengisi formulir permohonan, selanjutnya menyerahkan persyaratan yang ada kepada petugas Mepeling. Pelayanan yang diberikan pun cepat dalam waktu sehari jadi sesuai dengan yang di janjikan sehingga menghilangkan praktek percaloan.
2. Kelenturan. Indikator ini menunjukkan hasil bahwa masyarakat mendapatkan kemudahan akses informasi mengenai program Mepeling.
3. Integrasi. Indikator ini menunjukkan hasil bahwa petugas pelayanan Mepeling melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
4. Inovasi. Indikator ini menunjukkan hasil bahwa program Mepeling memberikan pelayanan yang nyaman dan aman.

6.2 Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan temuan penelitian di atas, yaitu sebagai berikut:

Bagi penyelenggara program, yaitu Disdukcapil tetap mempertahankan semua aspek yang membuat program Mepeling ini berhasil dalam proses pelaksanaannya. Aspek tersebut yaitu Disdukcapil tetap memberikan pelayanan dengan cepat dan tidak berbelit-belit, mendekatkan masyarakat dalam mendapatkan layanan, tetap memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat, memiliki petugas pelayanan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan, serta memberikan pelayanan yang nyaman dan aman.

Daftar Pustaka

Buku:

- AR, Mustopadidjaja. *Manajemen Proses Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN-RI dan Duta Foundation, 2003.
- Grindle, Merilee S. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press, 1980.
- H Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*. Yogyakarta: Rake Sarakin, 2003.
- Korten, David C. "Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach." *Public Administration Review*, 1980.
- Meter, Van, Donald S and Carl, E Van Horn. *The Policy Implementation Proceess A Conceptual Framework in Administration and Sociey*. Sage: Baverly Hills, 1975.
- Nyoman, I. Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- T, Smith. B. *The Policy Implementation Process*. Amsterdam: Springer, 2010.
- Wahab, Abdul, *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi*

Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Jurnal :

Gaffar, Afan, 2009. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Perspektif Hukum*.

Bandung: CV Duta Karya

Harianto Hari. (2017). *Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri*

Kewarganegaraan Anak. Jakarta Timur: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI

Khaidir Afriva. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Dan Implementasi*

Dalam Pendidikan. Kota Padang: Universitas Negeri Padang.

Purwanto dan Sulistyastuti. (2020). *Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia*

Sehat Di Rumah Sakit Umum Daerah Manembo. Nembo: Jurnal

Administrasi Publik.

Thoha, Miftah, 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Wahab, Abdul Solihin, 2006. *Implementasi Kebijakan dan Program Pemerintah*

Di Indonesia: Yogyakarta: PT Nusantara Jaya

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis*

Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedi Publishing.

Artikel:

Unicef. (1989). *"Hak-Hak Anak"*. Indonesia: Unicef.org

Website :

Disdukcapil Kota Bandung (2016-2019) “Data Bayi Hidup Baru Lahir” Bandung.

<http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-kelahiran-bayi-hidup-dan-mati-berdasarkan-kecamatan-dan-puskesmas>. Diakses pada 23 November 2020.

Disdukcapil Kota Bandung (2020) “Alur Pelayanan Mepeling”

Bandung.<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdisdukcapilbdg%2Fstatus%2F915797569292214272&psig=AOvVaw1HYpXODrgObO0IE4JB9Qyt&ust=1623855496335000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCLjci9HlmfECFQAAAAAdAAAAABAD>

. Diakses pada 23 November 2020.

Disdukcapil Kota Bandung (2020) “SIAPA KAMI” Bandung.

<https://disdukcapil.bandung.go.id/>. Diakses pada 14 Juli 2021.

Disdukcapil Kota Bandung (2020) “Visi Misi” Bandung.

<https://disdukcapil.bandung.go.id/>. Diakses pada 12 Juli 2021

Peraturan Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Keputusan MENPAN Nomor:

63/KEP/MENPAN/7/2003.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

tentang *Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*

Peraturan Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang *Standar Pelayanan*

Minimal

Peraturan Walikota Kota Bandung No 1391 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Disdukcapil Kota
Bandung